

KEPENTINGAN POLITIK PEMERINTAHAN MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN: PERPINDAHAN KEKUASAAN DARI KUFAH KE DAMASKUS

Nurus Syarifah

Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Jalab Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia
Pos-el: nurussyarifah29@gmail.com

Abstract: This article explains about the events of political interest that occurred during the time of Ali bin Abi Thalib, from the murder of Utsman bin Affan to move of power to Damascus by Muawiyah bin Abu Sufyan. The method used in this research is descriptive analytical method. This method is used to map the discussion and answer the question why Mu'awiyah chose Damascus as the center of his power and what was the reason to move? After conducting the research, it can be concluded that the conflict between Ali bin Abu Talib and Muawiyah bin Abu Sufyan was based on the failure of Ali bin Abi Talib to reveal the case of Utsman bin Affan. This failure triggered domestic political turmoil due to Muawiyah's disapproval of Ali's performance, which seemed to have taken the case seriously. The Shiffin war incident became the entrance for Muawiyah to overthrow Ali bin Abi Talib. Tahkim, which could be expected as a solution to the conflict, actually became a loss for Ali and left the leadership to his son, Husein. Muawiyah's soft power strategy to coup Husein went smoothly. After he assumed control as caliph, Muawiyah moved the center of power to Damascus. This is because Damascus is a strategic area and can provide benefits for the caliphate of Muawiyah bin Abu Sufyan.

Keywords: Political Interests; Mu'awiyah bin Abu Sofyan; Ali bin Abi Thalib; Damascus

Abstrak: Artikel ini menjelaskan tentang peristiwa kepentingan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, mulai dari kasus terbunuhnya Utsman bin Affan hingga perpindahan kekuasaan ke Damaskus yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk memetakan pembahasan dan menjawab pertanyaan mengapa Mu'awiyah memilih Damaskus sebagai pusat kekuasaannya dan apa alasan pemindahan tersebut? Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan dilatatarbelakangi oleh kegagalan Ali bin Abi Thalib mengungkap kasus Utsman bin Affan. Kegagalan tersebut memicu gejolak politik dalam negeri karena ketidakterimaan pihak Muawiyah terhadap kinerja Ali yang terkesan tidak sungguh-sungguh menangani kasus tersebut. Peristiwa perang Shiffin menjadi pintu masuk Muawiyah untuk menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Tahkim yang semula dapat diharapkan sebagai solusi konflik justru menjadi kerugian bagi pihak Ali dan menyerahkan pimpinan kepada anaknya, Husein. Strategi *soft power* Muawiyah untuk meng kudeta Husein berjalan mulus. Setelah ia memegang kendali sebagai khalifah, Muawiyah memindahkan pusat kekuasaan ke Damaskus. Hal tersebut dikarenakan Damaskus merupakan wilayah strategis dan dapat memberikan keuntungan bagi kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan.

Kata kunci: Kepentingan Politik; Mu'awiyah bin Abu Sofyan; Ali bin Abi Thalib; Damaskus

Pendahuluan

Situasi dan kondisi politik yang terjadi di Kufah semakin memanas. Hal tersebut dikarenakan terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan sekitar tahun 36 H. Konstelasi politik ini diperkeruh dengan banyaknya tuntutan dan desakan kelompok-kelompok terhadap Ali untuk menuntaskan kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka meminta sang khalifah untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku maupun dalang di balik pembunuhan khalifah Utsman bin Affan.¹

Terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mengawali perseteruan antara dirinya dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Saat itu, Ali dibaiat menjadi pengganti Utsman oleh mayoritas umat Muslim. Namun sekelompok orang menuntut Khalifah Ali agar mengusut tuntas pembunuhan Utsman. Tuntutan atas kasus tersebut kemudian dipolitisasi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk kepentingannya. Hal tersebut menimbulkan konflik yang juga melibatkan para pendukung Ali dan juga Muawiyah.²

¹ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, terj. Amir Hamzah dan Misbah, jilid XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 225.

² Abdul Jamil Wahab, *Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 64-65.

Gejolak konflik ini diperparah dengan kegagalan Ali bin Abi Thalib mengungkap pembunuhan Utsman bin 'Affan yang merupakan kerabat Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Kekecewaan Mu'awiyah bin Abu Sufyan terhadap pengungkapan kasus tersebut mengakibatkan adanya friksi yang mbingkai ketegangan kedua belah pihak sehingga muncullah peristiwa perang Shiffin.³

Berakhirnya perang Shiffin ditandai dengan adanya *tahkim/* arbitrase yang awalnya bertujuan untuk mendamaikan konflik tersebut. Namun, proses ini tidak berjalan mulus. Pihak Mu'awiyah yang diwakili 'Amr bin 'Ash mengingkari kesepakatan yang telah terjalin dengan pihak Ali yang saat itu diwakili oleh Abu Musa Al-Asy'ari.

Hasil dari arbitrase itu memunculkan dualism kepemimpinan umat Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa di wilayah Syiria dan Mesir secara otonom. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib tetap memegang semua kendali kekuasaan dan berpusat di Basrah.

³ Perang Shiffin adalah perang yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada tanggal 1 Shafar 37 H/ 657 M. Peristiwa tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan peperangan. Ketika itu, pasukan Mu'awiyah bergerak menuju sungai Euphrates dari arah kota Shiffin, sedangkan pasukan Ali bin Abi Thalib bergerak dari Nukhailah menuju tanah Syam.

Akan tetapi, sejak saat itu friksi politik di kalangan umat Islam semakin tampak di permukaan. Ada kelompok yang aspirasi politiknya memihak Ali dan ada pula kelompok yang afiliasi politiknya mendukung Muawiyah.⁴

Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, pembaiatan khalifah diberikan kepada Hasan yang merupakan putra Ali. Namun, usia Hasan yang kala itu masih sangat muda membuatnya tidak siap untuk menjadi khalifah saat itu. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Mu'awiyah bin Abu Sofyan untuk merangkai siasat merebut kekhalifahan dari Hasan. Komunikasi yang terjalin antara Mu'awiyah dan Hasan akhirnya menemui kesepakatan bahwa Hasan menyerahkan posisinya sebagai khalifah kepada Mu'awiyah. Ia pun kemudian dibaiat sebagai seorang khalifah. Setelah menjadi khalifah, ia memindahkan kekuasaan yang semula berada di Kufah beralih ke Damaskus. Pemindehan kekuasaan yang dilakukan oleh Mu'awiyah ini tentu menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa Mu'awiyah memilih Damaskus sebagai pusat kekuasaannya dan apa alasan pemindahan tersebut? Jawaban dari pertanyaan ini akan dipaparkan dalam pembahasan berikut.

⁴ Abdul Jamil Wahab, *Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, h. 65.

Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menghimpun data-data yang relevan dengan pembahasan terlebih dahulu, untuk kemudian dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, maupun laporan penelitian yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian.⁵ Data-data yang relevan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dibaca, dipahami dan dianalisis, sehingga dapat menyajikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini.

Pembahasan

Terjadinya Perang Shiffin

Besarnya gelombang fitnah pada masa Ali memicu timbulnya perang saudara, yang melibatkan sahabat-sahabat Nabi. Salah satunya yaitu perang Shiffin yang terjadi pada tahun 37 H di tebing Sungai Furat yang kini terletak di Suriah (Syam). Perang ini merupakan perang

⁵ Moehnilabib, dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997), h. 89.

antara kubu Ali dan kubu Mu'awiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Mu'awiyah menolak untuk membaiat Ali sebagai khalifah dengan alasan Ali tidak mengambil satu pun langkah nyata untuk membalaskan darah Utsman. Namun, beberapa riwayat menyebutkan bahwa penyebab sebenarnya hanyalah karena Mu'awiyah, yang telah lama menjabat sebagai gubernur, tidak rela kehilangan jabatannya yang saat itu ingin diganti oleh Ali dengan Sahal bin Hunaif.⁶

Tuntutan ini disuarakan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang memiliki hubungan nasab dengan Utsman dari jalur Umayyah bin 'Abd asy-Syams, kemudian didukung oleh sahabat-sahabat lain seperti Ubadah bin ash-Shamit, Abu ad-Darda', Abu Umamah, Amr bin Abasah, dan sahabat lainnya.⁷

Sebenarnya Ali bukan tidak ingin segera mencari dan menghukum para pembunuh Utsman, akan tetapi dalam periode awal kepemimpinannya, Ali lebih memprioritaskan stabilitas politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri. Ali banyak mengubah kebijakan yang dilakukan Utsman pada periode sebelumnya, salah satunya dengan

mencopot gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali meyakini bahwa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka. Selain itu, Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan oleh Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam, sebagaimana pernah diterapkan oleh pemerintahan khalifah Umar bin Khattab.

Pada bulan Shafar 37 H/657 M, peperangan tak terhindarkan, terjadilah perang tersebut dengan kekuatan 95.000 orang di pihak Ali dan 85.000 orang di pihak Mu'awiyah. Pihak Ali yang dipimpin oleh Malik al-Asytar hampir memperoleh kemenangan, ketika Amr bin Ash yang memimpin pasukan Mu'awiyah melancarkan siasat yang cerdik dengan menancapkan Alquran di ujung tombak dan mengacungkannya. Ini dimaksudkan sebagai pertanda seruan untuk mengakhiri peperangan dan mengikuti keputusan Al-Quran.⁸

Adanya desakan dari para pengikutnya, akhirnya Ali menerima usulan Mu'awiyah untuk melakukan arbitrase (*tahkim*) dengan menunjuk juru bicara antara kedua belah pihak. Pihak Ali menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari,

⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, (Yogyakarta: Saufa, 2014), h. 113.

⁷ Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, terj. Amir Hamzah dan Misbah, jilid XI, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 225.

⁸ Ibnu Muhazim, *Waqi'ah al-Shiffin*, (Kairo: Bashirati, 1974), h. 478.

sedangkan pihak Mu'awiyah menunjuk Amr bin Ash yang dikenal sebagai politisi ulung bangsa Arab. Setelah melakukan perundingan, akhirnya kedua belah pihak merumuskan sebuah kesepakatan:⁹

1. Menurunkan Ali dan Mu'awiyah dari kursi kekhalifahan
2. Kewenangan pemerintahan selanjutnya diberikan pada badan musyawarah umat, untuk mencari bentuk pemilihan pemimpin yang paling tepat bagi mereka, baik pihak Ali dan Mu'awiyah maupun pihak yang lain.

Namun kesepakatan ini menuai kontroversi. Kedua perwakilan sepakat untuk menurunkan pemimpin mereka di depan publik, dimulai oleh Abu Musa Al-Asy'ari sebagai orang yang lebih tua untuk menyampaikan orasinya dengan mencopot Ali dan Mu'awiyah dari jabatannya. Akan tetapi, pada giliran Amr bin Ash, ia mengkhianati kesepakatan tersebut. Ia mengumumkan dan menetapkan Mu'awiyah sebagai khalifah dikarenakan Ali mundur dari kekhalifahan. Hasil arbitrase semacam ini sangat merugikan pihak Ali yang secara *de jure* memiliki legitimasi sebagai khalifah yang sebenarnya, sementara Mu'awiyah hanya menjabat sebagai gubernur provinsi. Adapun kerugian lain yang ditimbulkan adalah turunnya simpatisan pendukung

Ali, salah satunya dengan munculnya kelompok Khawarij sebagai kelompok yang keluar dari barisan pendukung Ali dikarenakan kekecewaan mereka terhadapnya.

Dari sini terlihat bagaimana strategi yang diterapkan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan untuk menggulingkan Ali dari kursi kekhalifahan berjalan dengan baik. Kelompok Mu'awiyah hampir mengalami kekalahan pada saat terjadinya perang Shiffin. Dalam kondisi seperti itu, Mu'awiyah tentu saja tidak ingin kehilangan kekuatan di hadapan Ali. Mu'awiyah sadar bahwa cara *hard power* tidaklah efektif untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Mu'awiyah menggunakan strategi *soft power* untuk menyelamatkan wajah mereka. Tahkim adalah jalan diplomasi yang dipilih oleh Mu'awiyah untuk memainkan babak baru dalam ketegangan kedua pihak.

Strategi Mu'awiyah menggunakan cara *soft power* tidaklah sia-sia, hal ini juga mengakibatkan kelompok Ali bin Thalib terbelah menjadi dua. Sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib menginginkan tahkim sebagai solusi mengakhiri perang Shiffin, sedangkan sebagian lagi tidak sependapat dengan adanya tahkim terlebih Ali bin Abi Thalib juga tidak menginginkannya. Di tengah gejolak internal tersebut, Ali bin Abi Thalib melihat mayoritas kelompoknya

⁹ Ibnu Katsir, *Al Bidayah*, h. 401.

menginginkan tahkim sehingga ia memutuskan untuk mengikuti ajakan kelompok Mu'awiyah. Ketika ia mengusulkan Malik al-Asytar untuk mewakili pihaknya dalam perundingan bersama Mu'awiyah, lagi-lagi desakan muncul dari mayoritas kelompoknya yang mendorong Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi wakil dalam tahkim tersebut. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa untuk menjadi delegasi pihaknya. Sedangkan dari pihak Mu'awiyah, Amr bin Ash yang turun sebagai delegasi kelompoknya.

Perundingan tersebut awalnya berjalan lancar dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang disepakati bersama. Hingga akhirnya kedua pihak akan mengumumkan hasil tahkim tersebut. Sebelum pengumuman tersebut, Amr bin Ash yang merupakan seorang politikus handal mempersilahkan Abu Musa untuk menjadi orang pertama yang menginformasikan hasil kesepakatan di depan dua kedua belah pihak. Amr bin Ash menjadikan aspek senioritas sebagai dalih untuk mendahulukan Abu Musa, namun ternyata ada motif lain di balik aspek "senioritas" tersebut. Ternyata Amr bin Ash telah mengatur siasat untuk memberikan informasi yang kontradiktif dengan pernyataan Abu Musa. Ketika Abu Musa terlebih dahulu menyampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah

bersedia turun dari kursi kekhalifahan berdasarkan isi tahkim yang telah disepakati bersama, Amr bin Ash melakukan pengkhianatan dengan mengingkari kesepakatan tersebut saat memberikan pernyataannya. Ia hanya menyetujui penurunan Ali bin Abi Thalib dari kursi khalifah dan selanjutnya mengangkat Mu'awiyah sebagai khalifah.

Setelah pernyataan Amr bin Ash tersebut, kelompok Ali bin Abi Thalib kembali terpecah menjadi dua, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah menjadi basis kelompok yang loyal terhadap Ali bin Abi Thalib, sedangkan Khawarij menjadi kelompok yang tidak memihak Ali maupun Mu'awiyah. Strategi Mu'awiyah untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib dari kursi khalifah berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan turunnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kemudian Mu'awiyah juga berhasil melemahkan basis kelompok Ali yang sebelum adanya tahkim hampir memenangkan perang Shiffin dan membuat Mu'awiyah menderita kekalahan.

Terbunuhnya Khalifah Ali hingga Pembaiatan Mu'awiyah

Konflik dan pemberontakan semakin gencar usai terjadinya *tahkim* antara pihak Ali dan Mu'awiyah. Disamping dualisme kelompok tersebut, terdapat pula kelompok ketiga yang

melakukan oposisi terhadap Ali dan Muawiyah. Kelompok ketiga ini pada awalnya merupakan pendukung Ali, namun mereka kecewa terhadap Ali karena dianggap menyetujui arbitrase yang jelas-jelas merugikan pihak Ali. Mereka berjumlah kurang lebih 12.000 tentara dan kemudian membuat basis kekuatan di wilayah Harurah. Mereka dikenal dengan nama kelompok Khawarij.¹⁰

Situasi semacam ini terus berlangsung hingga akhirnya memuncak dengan terbunuhnya khalifah Ali. Ia ditusuk dengan pedang beracun saat sedang beribadah di masjid Kufah, oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan kelompok Khawarij. Wafatnya khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 21 Ramadhan tahun 40 H/661 M ini menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi para pengikut setia khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu Syi'ah. Oleh karenanya, tidak lama kemudian para pengikut Ali bin Abi Thalib (Syi'ah) melakukan sumpah setia (baiat) atas Hasan bin Ali untuk di angkat menjadi khalifah pengganti khalifah Ali bin Abi Thalib.¹¹

Sebenarnya, pasca wafatnya Ali terjadi dualisme kepemimpinan di

kalangan umat Islam, para penduduk di wilayah Irak mengangkat Hasan bin Ali sebagai penerus Ali, sementara Mu'awiyah dinobatkan sebagai khalifah di wilayah Syria. Hal ini terus berlangsung bahkan diwarnai dengan desakan dari pihak Mu'awiyah hingga berakhir dengan perjanjian damai yang dikenal dengan '*Amul Jama'ah*' atau tahun persatuan. Perjanjian ini terjadi pada tahun 41 H/ 662 M. Adapun isi dari perjanjian tersebut adalah:¹²

1. Hasan bin Ali rela turun dari khalifah demi persatuan umat Islam
2. Mu'awiyah tidak mencela Ali bin Abu Thalib
3. Setelah kepemimpinan Mu'awiyah, khalifah selanjutnya akan dipilih secara musyawarah.

Proses penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan dilakukan di suatu tempat yang bernama Maskin dengan ditandai pengangkatan sumpah setia. Dengan demikian, Mu'awiyah telah berhasil meraih cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin umat Islam menggantikan posisi dari Hasan bin Ali sebagai khalifah. Meskipun Mu'awiyah tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari warga kota Bashrah, usaha ini tidak henti-hentinya

¹⁰ Abdul Jamil Wahab, *Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, h. 65.

¹¹ Mahmoud M. Ayoub, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 2003), h. 196.

¹² M.A. Shaban, *Sejarah Islam (600-750): Penafsiran Baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 121.

dilakukan oleh Mu'awiyah sampai akhirnya secara *defacto* dan *dejure* jabatan tertinggi umat Islam berada di tangan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian berdirilah dinasti baru yaitu Dinasti Bani Umayyah (661-750 M).¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dilihat bahwa Mu'awiyah memang mengedepankan kekuatan *soft power*-nya untuk merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Adanya kaum khawarij dalam pusran konflik tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Mu'awiyah. Meskipun secara implisit maupun eksplisit Khawarij tidak mendukung kedua pihak tersebut, tetapi dengan adanya Khawarij, turut andil dalam melemahkan pengaruh Ali bin Abi Thalib. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Khawarij membuktikan bahwa ia kini tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk merangkul *eks-pengikutnya*.

Pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kelompok Syi'ah membaiat putra Ali bernama Hasan sebagai khalifah selanjutnya. Melihat situasi ini, Muawiyah mendapatkan peluang untuk mengambil alih kekuasaan kaum muslimin secara penuh. Ia membawa sekitar 40.000 pasukan tempur ke Kufah yang mana ketika itu masyarakatnya telah membaiat

Hasan bin Ali sebagai Khalifah menggantikan ayahnya. Muawiyah kemudian menantang pihak Hasan untuk berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, Hasan tidak menghendaki adanya peperangan. Hasan memilih jalan damai dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan sejumlah perjanjian.¹⁴ Usaha tersebut berhasil dan Hasan memberikan kursi kekhalifahan kepada Mu'awiyah, sehingga secara *de facto* dan *de jure* Mu'awiyah resmi menjadi khalifah.

Pasca penyerahan kekuasaan kepada Muawiyah, kelompok pendukung Ali ternyata semakin berkembang pesat, khususnya di Kufah. Mereka bahkan mengundang Husen bin Ali yang saat itu di Makkah untuk datang ke Kufah dan akan mereka daulat sebagai khalifah. Husen pun berangkat memenuhi undangan tersebut dengan rombongan berjumlah 70 orang. Saat perjalanan sudah mendekati Kufah -tepatnya di padang karbala- mereka mendapat serangan tak terduga dari 4.000 pasukan di Kufah yang dipimpin oleh Amr bin Saad. Penyerangan tersebut atas perintah Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad.¹⁵

¹⁴ Abdul Jamil Wahab, *Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, h. 65.

¹⁵ Abdul Jamil Wahab, *Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, h. 66.

¹³ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Muassasah al-A'lami lil Matbu'ah, 1983), h. 159.

Pembunuhan terhadap Husen yang lebih dikenal sebagai peristiwa karbala tersebut memiliki tendensi terhadap kekuasaan dari kekhalifahan Muawiyah. Dengan meninggalnya Husen, maka Muawiyah tidak terlalu merasa khawatir akan ancaman kudeta kekuasaannya. Terlebih, sebelum terbunuhnya Husen, basis kekuatan kelompok Syiah di Kufah berkembang pesat dan kuat. Hal ini tentu saja bisa mengganggu kebijakan-kebijakan dan strategi politik Muawiyah dalam menjalankan system pemerintahannya.

Usaha dan Kebijakan Mu'awiyah bin Abu Sufyan

Mu'awiyah dibaiat sebagai khalifah -setelah mendapatkan limpahan kekuasaan penuh dari Hasan bin Ali- pada tahun 40 H/ 660 M di Illiya (Yerusalem). Selanjutnya, ia memindahkan pusat kekuasaan dan pemerintahan dari Kufah ke Suriah dengan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kerajaan Islam, yang mana sebelumnya Damaskus adalah ibu kota provinsi Syria. Perpindahan pusat pemerintahan ke Damaskus menjadi langkah yang sangat strategis bagi Mu'awiyah untuk melebarkan kekuasaannya ke Mesir, Armenia, Mesopotamia utara, Georgia dan Azerbaijan sampai ke Asia kecil dan

Spanyol.¹⁶ Selain itu, pemindahan ibu kota negara ini juga memiliki implikasi politis dan merupakan fenomena baru yang disuguhkan Mu'awiyah kepada masyarakat dan rival politiknya. Damaskus bagi Mu'awiyah merupakan basis kekuasaan dan kekuatan, sehingga sangat logis kalau pusat pemerintahannya tidak berada lagi kota Kufah.¹⁷

Mu'awiyah sebagai khalifah memiliki basis yang rasional dan solid untuk pembangunan landasan politik berikutnya di masa depan, di antaranya yaitu:

1. Dukungan yang kuat dari masyarakat Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Suriah yang telah lama diperintah oleh Mu'awiyah mempunyai pasukan yang kokoh, terlatih, dan disiplin di garis depan dalam peperangan melawan Romawi.¹⁸

¹⁶ Siti Maryam, dkk, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h. 81.

¹⁷ Khoiro Ummatin, "Tiga Pilar Penyangga Eksistensi Dinasti Umayyah", *Jurnal Dakwah*, Vol. XIII, No. 2, Tahun 2012, h. 209.

¹⁸ Mu'awiyah bin Abi Sufyan merupakan salah satu sahabat yang dipercaya Nabi saw. sebagai penulis al-Qur'an. Pada masa Khulafaur Rasyidin, ia diangkat menjadi salah seorang panglima perang di bawah komando utama Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menaklukkan Palestina, Suriah dan Mesir dari tangan Imperium Romawi Timur. Kemudian ia menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa Khalifah Umar bin Khathab. Saat itu Suriah merupakan sebuah provinsi penting dalam kekuasaan Bizantium, kemudian ditaklukkan oleh para pahlawan muslim di bawah komando Khalid bin Walid, dengan perjuangan yang terus menerus berhasil menumbangkan imperium

2. Sebagai seorang administrator, Mu'awiyah bin Abi Sufyan sangat bijaksana dalam menempatkan para pembantunya dalam jabatan-jabatan penting.
3. Mu'awiyah memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat *hilm* -sifat penting yang dimiliki oleh pembesar Makkah pada zaman dahulu-, *hilm* yaitu sifat seseorang yang dapat menguasai diri secara mutlak dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang menentukan, meskipun ada tekanan dan intimidasi.

Adapun kebijakan Mu'awiyah dalam mengatur, menguatkan kedaulatan pemerintahan, mengatur persoalan politik dan administrasi negara, di antaranya yaitu:

1. Meminta pengakuan dari para pengikut Hasan bin Ali. Hasan bin Ali dengan tegas telah mengakui Mu'awiyah sebagai pemimpin kepada para

pengikutnya. Oleh karena itu, Hasan meminta agar pengikutnya pun melakukan seperti apa yang dilakukannya, yaitu menjadikan Mu'awiyah sebagai pemimpin mereka, serta patuh dan tunduk pada Mu'awiyah setelah melakukan bai'at kepadanya.

2. Memindahkan pusat kekuasaan ke Damaskus, dengan alasan rakyat kota Damaskus merupakan basis pendukungnya dan wilayah yang sangat strategis untuk mengembangkan kekuasaannya ke bekas-bekas wilayah kekuasaan kerajaan Romawi di bagian utara.¹⁹
3. Mengangkat para pejabat gubernur, baik yang berasal dari yang pro maupun kontra terhadapnya. Mu'awiyah telah memilih beberapa orang yang dapat memperkuat posisi kepemimpinannya. Mereka adalah Amr bin Ash, Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad bin Abihi.²⁰

Heraklius di negeri Syam. Satu persatu kota di negeri tersebut berhasil ditaklukkan, Antiokia, Aleppo, Qinasrin, di wilayah utara jatuh ke tangan putra-putra padang pasir, sementara di wilayah selatan Caesarea menyerah di tangan Mu'awiyah setelah diserbu berkali-kali dan dikepung selama tujuh tahun. Antara 633 dan 640, semua wilayah dari selatan ke utara, berhasil ditaklukkan. Sedangkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Mu'awiyah kembali menjadi gubernur Suriah yang membawahi wilayah Suriah, Palestina dan Jordania. Lebih lanjut lihat Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), h. 189.

¹⁹ Selain itu, pengambilan keputusan ini didasarkan pada pertimbangan politik dan alasan keamanan. Damaskus terletak jauh dari Kufah yang merupakan pusat kaum Syi'ah (pendukung Ali) dan jauh pula dari Hijaz yang merupakan tempat tinggal mayoritas Bani Hasyim dan Bani Umayyah, sehingga bisa terhindar dari konflik yang lebih tajam antara kedua bani itu dalam memperebutkan kekuasaan.

²⁰ Ketiga orang ini dengan Mu'awiyah merupakan empat politikus yang sangat mengagumkan di kalangan muslim Arab. Lebih lanjut lihat Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, terj. Hartono

4. Membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, darat, laut dan kepolisian yang tangguh dan loyal. Mereka diberi gaji yang cukup, bahkan dua kali lebih besar dibanding gaji yang diberikan Umar pada tentaranya.
5. Merekrut orang-orang non-Muslim sebagai pejabat-pejabat dalam pemerintahan, seperti penasehat, administrator, dokter dan di kesatuan-kesatuan tentara.
6. Mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru yang sangat banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Byzantium.
7. Mengubah sistem pemerintahan dari bentuk khalifah yang bercorak demokratis menjadi sistem *monarchi hereditary* (kerajaan/ dinasti).

Sejak Mu'awiyah menjabat sebagai khalifah, permasalahan negara menjadi stabil, keamanan dalam negeri terkendali, ekspansi wilayah yang sebelumnya sempat terhenti karena adanya konflik internal, kembali dilanjutkan. Salah satu ekspansinya yang paling spektakuler adalah keberhasilannya menaklukkan Afrika Utara seluruhnya. Kemudian ia juga berhasil melebarkan ekspansinya ke arah timur hingga Khurasan, Sijistan dan negeri-negeri di seberang sungai Jaihun.

Hadikusumo, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 19.

Dengan keberaniannya, ia pun berhasil mengepung Kota Konstatinopel melalui Ekspedisi yang dipusatkan di Kota Pelabuhan Dardanela.²¹

Mu'awiyah berusaha kuat meletakkan dasar pemerintahan dan membangun kebudayaan Islam. Kebijakan politik yang ia terapkan salah satunya dengan memperluas wilayah kekuasaan sampai ke wilayah Afrika, sehingga kekuasaan Islam bertambah luas. Langkah ini bertujuan untuk menyelamatkan dan mengamankan kekuasaan negara. Setelah daerah kekuasaan pemerintahan Islam kuat dan luas, maka langkah pembangunan kebudayaan Islam mendapat prioritas. Banyak karya nyata yang dihasilkan pada masa pemerintahannya, mulai dari yang sifatnya bidang keilmuan, pemerintahan hingga ke pembangunan fisik. Perkembangan pembangunan ini makin menunjukkan kepada dunia bahwa eksistensi Islam tidak mengalami perubahan bahkan memiliki kecenderungan makin kuat. Kekuatan pemerintahan Islam ini menjadikan politik umat Islam disegani dan diperhitungkan oleh negara-negara Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas, setelah Mu'awiyah menjadi khalifah, ia lekas memindahkan kekuasaan dari Kufah

²¹ Yusuf Sou'yb, *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 21.

ke Damaskus untuk membangun kekuatan dan menstabilkan tatanan pemerintahan. Hal tersebut lazim dilakukan oleh seorang pemimpin. Seperti halnya negara yang baru merdeka, maka negara tersebut akan fokus terhadap aspek pertahanan dan pemerintahan, untuk menjaga dan menopang stabilitas perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Mu'awiyah menyadari bahwa Kufah bukan basis wilayah yang dihuni oleh para simpatisannya. Hal tersebut tentu saja akan menghambat kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Mu'awiyah karena ia akan banyak mendapatkan pertentangan, terlebih para pendukung Ali bin Abi Thalib belum sepenuhnya menerima keberadaan Mu'awiyah sebagai khalifah meskipun Hasan telah menerima dan menyerukan para pengikutnya untuk mengikuti dan mematuhi Mu'awiyah.

Mu'awiyah tetap memainkan aspek *soft power* untuk mendukung pemikiran serta kebijakannya, ia menggunakan alasan bahwa Damaskus adalah wilayah strategis sebagai pusat pemerintahan. Ketika ia sudah berhasil pindah, maka ia menguatkan pengaruhnya terhadap kelompoknya dan masyarakat untuk mendukung pemerintahannya. Sehingga selanjutnya, ia bisa membangun pemerintahan yang ideal dan stabil.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perpindahan kekuasaan dari Kufah ke Damaskus memang diwarnai dengan berbagai peristiwa seperti, perang Shiffin, adanya tahkim/ *arbitrase*, terbunuhnya Ali, pengangkatan Hasan hingga pembaiatan Mu'awiyah sebagai khalifah. Mu'awiyah memilih Damaskus sebagai pusat kekuasaan karena wilayah tersebut sangat strategis dan diisi oleh basis kekuatan pendukungnya sehingga memudahkan dirinya untuk menentukan arah kebijakan dalam membangun pemerintahan yang stabil dan kuat. Adapun kepentingan politik Mu'awiyah di balik pemindahan kekuasaan tersebut untuk memperluas kekuasaan Islam, di samping mengamankan posisinya sebagai khalifah, orang nomer satu dalam pemerintahan Islam saat itu.

Pustaka Acuan

- Ayoub, Mahmoud M, *The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik dalam Sejarah Muslim*, Bandung: Mizan, 2003.
- Azizi, Abdul Syukur al, *Kitab Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*, Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Hitti, Philip K, *History of the Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.

- Katsir, Ibnu, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Terj. Amir Hamzah dan Misbah, Jilid XI, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Maryam, Siti, dkk, *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Muhazim, Ibnu, *Waqi'ah al-Shiffin*, Kairo: Bashirati, 1974.
- Shaban, M.A, *Sejarah Islam (600-750): Penafsiran Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sou'yb, Yusuf, *Sejarah Daulat Umayyah I di Damaskus*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Thabari, Muhammad bin Jarir al-, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Beirut: Muassasah al-A'alami lil Matbu'ah, 1983.
- Ummatin, Khoiro, "Tiga Pilar Penyangga Eksistensi Dinasti Umayyah," *Jurnal Dakwah*, Vol. XIII, No. 2, Tahun 2012, 203-226.
- Wahab, Abdul Jamil, *Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Watt, Montgomery, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*, Terj. Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.